



JBK

Jurnal Bisnis & Kewirausahaan

Volume 21 Issue 1, 2025

ISSN (*print*) : 0216-9843

ISSN (*online*) : 2580-5614

Homepage : <http://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi DIY Tahun 2012-2023 dengan Pendekatan Model *Mixed Effect*

Ariadna Aqila Faranisa¹, Angelita Titis Pertiwi², Istiarsi Saptuti Sri Kawuryan³, Sotya Fevriera⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

² angelita.pertiwi@uksw.edu

Abstract. The outcomes of development in each region depend on the endowment and management of the area. The differences of development outcomes cause the phenomenon of inequality in income distribution, which can be conceptually observed and measured by the Gini index. This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI), the Open Unemployment Rate (OUR), and the Regional Minimum Wage (RMW) on income distribution inequality in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Province for the period 2012-2023. This research employs panel data analysis with a mixed effect model and uses Stata 14 as the analytical tool. The study demonstrates that the HDI and OUR variables have a positive and significant impact on income distribution inequality, whereas the RMW variable does not have a significant effect on income distribution inequality in DIY from 2012 to 2023. Although the Gini index in DIY Province is relatively low, the results of the mixed effect model indicate significant inequality across its regencies/ cities. The local government of DIY and other related stakeholders should ensure that education, healthcare, and employment are accessible for all people in DIY.

Keywords: *gini ratio, human development index, open unemployment rate, regional minimum wage*

Abstrak. Hasil pembangunan disetiap wilayah bergantung pada potensi dan pengelolaan suatu daerah. Perbedaan hasil pembangunan memunculkan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan dan secara konseptual dapat dilihat dari nilai indeks gini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 2012-2023. Model penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model *mixed effect* dan alat analisis *Stata 14*. Penelitian membuktikan bahwa variabel IPM dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Walaupun indeks gini Provinsi DIY tergolong rendah namun hasil *mixed effect* model menunjukkan bahwa ketimpangan tiap kabupaten/kota signifikan. Pihak terkait dan pemerintah daerah DIY perlu memastikan bahwa pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dapat diakses oleh masyarakat DIY.

Kata Kunci: *rasio gini, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum regional*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan pembangunan skala nasional dan daerah dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan (terbukanya lapangan pekerjaan; kemudahan akses pendidikan dan kesehatan serta memiliki kesempatan melakukan investasi) merupakan bentuk nyata dari hasil pembangunan yang disesuaikan dengan potensi suatu daerah (Sanjaya et al., 2022). Namun kenyataannya hasil pembangunan yang merata masih belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil dari kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia mengindikasikan terjadinya disparitas/ ketimpangan distribusi pendapatan di setiap wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan kondisi dimana terdapat perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat pendapatan sehingga memunculkan dualisme kelompok masyarakat kaya dan miskin (Sugihastuti & Pratama, 2022). Dualisme tersebut sebagai bentuk nyata dari ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan perbedaan proses pembangunan dengan mengelola sumber daya alam dan kondisi demografi yang dimiliki setiap daerah sehingga muncul istilah daerah maju dan daerah berkembang (Arafah & Khoirudin, 2022). Perbedaan hasil pembangunan yang memunculkan fenomena disparitas pendapatan secara konseptual dilihat dari nilai indeks gini.

Indeks Gini merupakan indikator yang sering digunakan dalam melihat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah/wilayah. Nilai indeks gini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, kategori ketimpangan rendah dengan nilai kurang dari 0,40. Kedua, kategori ketimpangan sedang dengan nilai 0,40 hingga 0,50. Ketiga, kategori ketimpangan tinggi dengan nilai lebih dari 0,50 hingga 1. Pada tahun 2008 Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 11,06 dan Indeks Gini terendah sebesar 0,35 (Rifki et al., 2019). Ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia menurut klasifikasi World Bank termasuk kedalam tingkat ketimpangan sedang, dengan rata – rata rasio gini diatas batas wajar yaitu 0,40 (Indra Putra & Lisna, 2020). Jika dibandingkan dengan negara – negara Asia, pada tahun 2008 kondisi ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia tergolong rendah (sebesar 0,35) dibandingkan rata – rata Indeks Gini negara – negara Asia salah satunya negara Thailand dengan Indeks Gini sebesar 0,40 (World, 2023).

Kondisi tersebut disebabkan karena perekonomian Indonesia mengarah trend positif, dimana beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan perekonomian dapat dikatakan kondusif. Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan secara Nasional diatas memiliki perbedaan dengan kondisi di beberapa daerah. Hal ini menggambarkan bahwa dampak dari pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah dengan hasil yang berbeda sehingga terkadang dinilai cenderung terpusat pada suatu daerah (Kusuma et al., 2019). Kebijakan pembangunan dirancang dengan maksud terjadi sinkronisasi program pembangunan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun hasil dari kebijakan pembangunan pada kenyataannya memiliki perbedaan, bila dilihat dari indeks Gini yang berbeda antar daerah. Pada tahun 2022 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk dalam kriteria Provinsi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi di Indonesia, dimana besarnya indeks Gini sebagai penggambaran atas distribusi pendapatan pada bulan September 2022 sebesar 0,459 lebih besar dari angka Nasional sebesar 0.381 (Databoks, 2023).

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi DIY berdasar data Badan Pusat Statistik tahun 2017 sampai 2021 selalu berada diatas rata-rata indeks Gini Nasional (nilai rata – rata indeks Gini DIY sebesar 0.44 sedangkan nilai rata - rata indeks Gini Nasional sebesar 0,38). Kondisi ketimpangan pendapatan suatu wilayah dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan

tepat saran. Berbagai potensi yang ada di suatu wilayah tersebut bila dioptimalkan dengan baik maka dapat menekan ketimpangan pendapatan (Arafah & Khoirudin, 2022).

Fenomena tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan kondisi dan potensi antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kontribusi penerimaan pendapatan yang berbeda di setiap wilayah mendorong angka ketimpangan semakin tinggi. Wilayah Provinsi DIY yang didominasi dengan wilayah kabupaten sehingga mendorong ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sering kali pemerintah wilayah Provinsi DIY melakukan pembangunan ekonomi hingga pengelolaan sumber daya cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga wilayah pedesaan semakin timpang.

Pengelolaan sumber daya suatu wilayah akan memberikan manfaat berupa pendapatan akan dikelola melalui berbagai program yang pada akhirnya akan mengurangi disparitas pendapatan. Dalam melihat disparitas pendapatan ada beberapa indikator yang memiliki kaitan dengan pemerataan, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Regional (UMR). Indikator IPM, digunakan untuk melihat seberapa kuat pengaruh pembangunan yang dijalankan sehingga menentukan pembentukan manusia dalam mengoptimalkan kapasitas pertumbuhan ekonomi (Farhan & Sugianto, 2022). Komponen pembentuk IPM terdiri atas dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Kondisi Provinsi DIY pada tahun 2022 memiliki IPM sebesar 80,64, dimana proses pembangunan yang dijalankan telah berdampak terhadap bidang kesehatan, pendidikan dan pengeluaran masyarakat. Dimensi kesehatan, berdasar data (BPS, 2024a) DIY pada tahun 2022 angka harapan hidup 75,08. Hal ini menggambarkan masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY memiliki kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan sehingga kualitas kehidupan meningkat. Dimensi pendidikan, berdasarkan data (BPS, 2024b) lulusan Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta tahun 2021 sebesar 90,12 sedangkan ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,2. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi jumlah masyarakat yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dimensi pengeluaran masyarakat, tercermin dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita. Dimana pada tahun 2022 PDRB sebesar Rp. 44,85 juta yang sebelumnya sebesar Rp. 40,62 juta.

Indikator lain yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data BPS Provinsi DIY tahun 2022, nilai TPT sebesar 4,06 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai TPT di tahun 2022 tersebut berdasar penelitian yang dilakukan Sholikah (2022), Khoirudin dan Musta'in (2020) dan Istikharoh et al. (2020) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Yogyakarta. Namun demikian hasil yang berbeda diungkapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Izzati et al., 2021); (Fachruurrozi & Hasmarini, 2023) dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan hasil perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut maka diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk melihat keterkaitan TPT terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY dengan rentang waktu yang lebih lama (2012-2023).

Selain dua indikator diatas, maka tingkat UMR juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Hugh Rockoff, dalam buku Priyono dan Ismail (2016) yang menjelaskan mengenai teori Kontrol Harga menyatakan bahwa pemberlakuan upah minimum dilakukan demi meningkatkan pendapatan terhadap golongan pekerja miskin yang bekerja di pasar (Nurain & Juliannisa, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirudin dan Musta'in (2020), Khoiri et al. (2022) serta Juliana dan Soelistyo (2019) di Provinsi DIY menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan hasil penelitian penelitian Sulistyaningrum et al. (2022) dan Anshari et al. (2019) dalam melihat pengaruh Upah Minimum Regional (UMR)

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan. Pada tahun 2022, UMR di Provinsi DIY sebesar Rp. 1,84 juta,- , terjadi peningkatan 8 persen dibandingkan tahun 2021. Perubahan UMR terjadi perlu dicermati dalam kaitan keterkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal ini menjadi penting untuk di analisis.

Penggambaran atas ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY menjadi penting untuk dianalisis. Analisa terhadap setiap (IPM, TPT dan UMR) akan mengidentifikasi yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan melakukan pengujian setiap indikator yang diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan akan menjadi informasi terbaru atas kondisi yang terjadi di Provinsi DIY berdasar rentang data tahun 2012 hingga 2023 yang terdiri dari beberapa wilayah bawahan (Kabupaten/Kota).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 2012-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data indeks Gini, IPM, TPT dan UMR berupa publikasi yang bersumber Badan Pusat Statistik Provinsi DIY yang diterbitkan di *website*. Data pada penelitian ini merupakan data panel yang menggabungkan data *cross section* pada 5 (lima) wilayah (Kabupaten yaitu Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta) dan *times series* selama periode 2012 hingga 2023. Penelitian ini diolah dengan menggunakan *Stata* 14.

Penelitian ini menggunakan *mixed effect* model yang mengestimasi dua komponen yaitu *fixed* dan *random effect*. Selain itu kelebihanannya dapat melihat pengamatan di level yang lebih kecil / level 2. Model *mixed effect* merupakan permodelan khusus yang mengestimasi 2 komponen model berupa model tetap (*fixed effect*) dan faktor acak (*random effect*) (Field, 2018; Gujarati, 2021). Dalam penelitian ini Indeks Gini merupakan Variabel terikat sementara IPM, TPT dan UMR merupakan variabel bebas. Regresi panel data dengan *mixed effect* dalam penelitian diberikan oleh tiga jenis model dengan *robust standard error* untuk memastikan bahwa model tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Model pertama merupakan *varying intercept model* yang diberikan oleh Persamaan 1 berikut.

$$Gini_{it} = \beta_{0j} + \beta_1 IPM_{ij} + \beta_2 TPT_{ij} + \beta_3 UMR_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (1)$$

Dimana β_{0j} adalah intersep yang bervariasi antar kelompok karena mempertimbangkan efek acak, $\beta_{1,2,3}$ merupakan koefisien variabel independen yang mempengaruhi Indeks Gini, $j = 1,2,3,4$ menunjukkan wilayah kabupaten/kota dan ε_{ij} sebagai nilai residual (error)

Model kedua merupakan *varying slope model* yang diberikan oleh Persamaan 2 berikut.

$$Gini_{it} = \beta_0 + \beta_{1j} IPM_{ij} + \beta_{2j} TPT_{ij} + \beta_{3j} UMR_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

Dimana β_0 adalah intersep dengan efek tetap yang sama antar kelompok, $\beta_{1j,2j,3j}$ merupakan koefisien variabel terikat yang bervariasi karena mempertimbangkan efek acak, $j = 1,2,3,4$ menunjukkan wilayah kabupaten/kota dan ε_{ij} sebagai nilai residual (error)

Model ketiga *varying intercept and varying coefisien model* yang diberikan oleh Persamaan 3 berikut.

$$Gini_{it} = \beta_{0j} + \beta_{1j} IPM_{ij} + \beta_{2j} TPT_{ij} + \beta_{3j} UMR_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

Dimana β_{0j} adalah intersep yang bervariasi antar kelompok, $\beta_{1j,2j,3j}$ merupakan koefisien variabel terikat yang bervariasi karena mempertimbangkan efek acak, $j = 1,2,3,4$ menunjukkan wilayah kabupaten/kota dan ε_{ij} sebagai nilai residual (error).

Sebelum mengestimasi model *mixed effect* dilakukan deteksi awal penentuan model. Pertama dilakukan uji stasioneritas dengan menggunakan uji *Harris-Travalist*. Setelah itu dilakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) test untuk melihat apakah terdapat efek random didalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel *mixed effect* model dengan melakukan serangkaian pengujian untuk memperoleh hasil yang sesuai berdasarkan model matematis dan realitas yang terjadi. Selain itu model ini menggunakan *robust standard error* untuk menangani masalah heteroskedastisitas dan memberikan hasil estimasi yang konsisten (Gujarati, 2021). Pengolahan data panel dilakukan menggunakan software *stata* 14 dengan langkah pertama melakukan uji *hausman*. Penulis menggunakan MEM (*Mixed Effect Model*) yang memungkinkan fleksibilitas pada pemodelan dengan melihat kemungkinan efek acak di intersep dan koefisien regresi MEM memungkinkan pendekatan di unit pengamatan yang lebih kecil / level 2 (McNeish & Kelley, 2019). Dengan kata lain, MEM memungkinkan analisis di tingkat Provinsi DIY dan lanjut di tingkat kabupaten/kota di DIY.

Uji Deteksi Awal

Uji deteksi awal yang pertama adalah uji stasioneritas dengan menggunakan uji *Harris-Travalist* karena uji ini memiliki keunggulan berupa dapat menangani data panel yang memiliki *time series robust* terhadap jumlah data *time series* yang tidak terlalu panjang sehingga memberikan hasil statistik yang akurat. Berdasarkan uji *Harris-Travalist* data variabel Gini dan TPT stasioner pada tingkat level sementara data IPM dan UMR stasioner pada *first difference*. Sehingga untuk analisis lanjut variabel IPM dan UMR yang digunakan pada *first difference*. Berdasarkan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah *random effect* model. Konsekuensi dari model *random effect* adalah dapat menyelidiki dampak dari variabel – variabel tertentu terhadap respons dengan memperhitungkan variasi dalam efek acak maupun tetap sehingga pendekatan variabel tersebut lebih fleksibel serta dapat meningkatkan akurasi analisis.

Untuk memastikan bahwa estimasi yang dilakukan memenuhi kriteria BLUE dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matriks korelasi dan ditemukan bahwa korelasi antar variabel bebas tidak berkorelasi. Hasil multikolinearitas ini dilakukan dengan beberapa tahapan test yang bertujuan untuk tetap menstabilkan pemodelan sehingga variabel menjadi stasioner di tingkat *first difference* (perubahan variabel IPM menjadi *IPM difference* dan variabel UMR menjadi *UMR difference*).

Pengujian selanjutnya adalah uji normalitas *Jarque Berra* (JB). Hasil uji ini menunjukkan bahwa residu berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas *Jarque Berra* (JB) sebesar 0,6871 dimana lebih dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh IPM, TPT dan UMR secara simultan dengan Uji F. Penelitian ini menggunakan hasil uji *wald test* untuk melihat nilai probabilitas uji F. Berdasarkan hasil dari Uji F, probabilitas statistik mendekati 0 maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM, TPT dan UMR secara simultan atau bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Model terbaik yang memenuhi asumsi merupakan model *mixed effect* dengan intersep yang bervariasi yang diberikan oleh Tabel 1 yang menunjukkan hasil estimasi regresi data panel dengan *mixed effect*. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa konstanta Provinsi DIY sebesar 0,2913 atau dengan kata lain secara rata – rata indeks gini Provinsi DIY sebesar 0,2913 dari tahun 2012 hingga 2023. Menurut Todaro & Smith (2015) nilai rasio gini sebesar 0,29 termasuk ke dalam ketimpangan distribusi pendapatan yang tergolong rendah (kurang dari 0,4). Untuk

menjelaskan bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji *mixed effect* model.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Mixed Effect*

| Gini | Coef. | Robust Std. Err. | z | P> z | [95% Conf.] | Interval |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|-------|------------------------|-----------------------|
| D(IPM) | 0,0214 | 0,0067 | 3,18 | 0,001 | 0,0082 | 0,0345 |
| TPT | 0,0177 | 0,0041 | 4,29 | 0,000 | 0,0096 | 0,0258 |
| D(UMR) | $1,80 \times 10^{-7}$ | $1,39 \times 10^{-7}$ | 1,30 | 0,193 | $-9,13 \times 10^{-8}$ | $4,52 \times 10^{-7}$ |
| Konstanta | 0,2913 | 0,0324 | 8,98 | 0,000 | 0,2277 | 0,3549 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari Tabel 1 diketahui bahwa koefisien regresi pada perubahan IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,001. Karena nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka cukup bukti untuk menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Jika selisih IPM naik sebesar 1 satuan indek, maka ketimpangan akan naik sebesar 0,021 satuan indeks. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sholikhah (2022) dan Pratama (2019) namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afini (2019); Farhan dan Sugianto (2022) dan Fachruurrozi dan Hasmarini (2023). Pengaruh yang positif menjelaskan bahwa kemampuan masing – masing individu di setiap kabupaten/kota dalam menciptakan keahlian berbeda – beda sehingga kualitas sumber daya manusia bervariasi dan berpotensi meningkatkan kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi (Farhan & Sugianto, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia dapat dikatakan berhasil apabila akses perolehan pendidikan, kesehatan dan fasilitas penunjang sosial ekonomi lainnya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Sehingga output atas pembangunan ekonomi dapat terasa dan berdampak akan kemajuan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pratama, 2019). Walaupun IPM Provinsi DIY terus meningkat sebesar 81,09 tahun 2023 (lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 74,39) akan tetapi hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan dimensi pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita tidaklah merata dengan laju peningkatan yang masih tergolong rendah. Dilihat dari dimensi pendidikan, Provinsi DIY perlu strategi untuk meningkatkan partisipasi sekolah dari pendidikan menengah atas ke pendidikan tinggi. Hal tersebut juga akan mendorong peningkatan tingkat produktivitas seseorang dalam mengembangkan potensi diri (RPJMD Bappeda, 2013).

Perlunya perbaikan akses pendidikan agar setiap penduduk dapat menikmati jenjang pendidikan, terutama bagi lulusan SMA agar dapat didorong untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak di Provinsi DIY akan tetapi akses perguruan tinggi tersebut belum merata. Menurut data Susenas Badan Pusat Statistik (2023) mayoritas dirasakan oleh masyarakat perkotaan dengan proporsi 58% sementara masyarakat pedesaan sebesar 30,88% yang mendapatkan pendidikan tinggi.

Berdasarkan dari dimensi kesehatan di DIY, akses pelayanan Kesehatan belum merata. Jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada tidak serta merta dapat diakses oleh semua masyarakat di Provinsi DIY. Jaminan kesehatan yang ada juga tidak sepenuhnya dapat digunakan oleh semua kalangan karena prosedur dan kualitas layanan yang diterima berbeda apabila pasien tidak menggunakan jaminan kesehatan (BPS, 2024c). Sehingga adanya layanan kesehatan yang berupa Jamkesda, Jamkesmas dan BPJS Kesehatan yang ada belum dapat menjadi solusi untuk perbaikan dimensi kesehatan (RPJMD, 2023).

Dimensi pendapatan per kapita juga menjadi salah satu tolak ukur peningkatan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan kondisi di Provinsi DIY menunjukkan terjadinya gap pendapatan yang diterima sehingga daya beli masyarakat di setiap wilayah kabupaten/kota rendah dan timpang. Menurut Badan Pusat Statistika (2024b), pendapatan perkapita tertinggi di tahun 2023 masih diduduki oleh wilayah Kota Yogyakarta sebesar Rp.83.521. Pendapatan per kapita wilayah Kabupaten Sleman dua kali lipat lebih kecil dari wilayah Kota Yogyakarta (hanya

Rp.34.000). Sedangkan wilayah Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah dengan pendapatan perkapita terkecil sebesar Rp.20.971. Pendapatan per kapita yang rendah tersebut menyebabkan rendahnya pemenuhan kebutuhan sehari – hari masyarakat di wilayah kabupaten sehingga tingkat kesejahteraan ikut menurun.

Menurut Tabel 1 memiliki nilai probabilitas mendekati 0. Karena nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka cukup bukti untuk menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel TPT secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Apabila TPT naik sebesar 1 persen, maka ketimpangan akan naik sebesar 0,017 satuan indeks. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sholikhah (2022), Khoirudin dan Musta'in (2020) serta Istikharoh et al. (2020). Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Provinsi DIY belum terserap secara optimal oleh pasar tenaga kerja karena pasokan tenaga kerja yang tinggi tidak diikuti dengan adanya keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

Selain itu lebih dari 50% penduduk di DIY bekerja di sektor informal seperti pertanian, pariwisata dan industri pengolahan yang didominasi oleh UMKM sehingga rentan untuk kehilangan pekerjaan (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor formal lebih sulit dimasuki oleh angkatan kerja karena membutuhkan keahlian tertentu. Kondisi ini didukung oleh Badan Pusat Statistika (2020) yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat DIY merupakan lulusan SMA sehingga cenderung belum memiliki keahlian khusus dan produktivitas yang perlu ditingkatkan sehingga sulit diserap oleh dunia usaha khususnya sektor formal. Lulusan SMA banyak yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri sehingga dapat dikatakan sektor tersebutlah yang menjadi lapangan pekerjaan utama sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tetap ada dan bahkan dapat terus meningkat dikarenakan tidak menyebabkan peluang pekerjaan di sektor lainnya (RPJMD, 2023).

Persebaran pekerja di sektor formal dan informal juga erat kaitannya dengan karakteristik wilayah. Sektor formal biasanya berada di wilayah perkotaan karena infrastruktur yang lebih memadai dan menjadi pusat bisnis. Dimana sektor formal membutuhkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk memasuki lapangan pekerjaan tersebut (BPS, 2020). Menurut Badan Pusat Statistika (2020) bahwa wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tingkat penganggurannya lebih besar dari rata – rata pengangguran Provinsi DIY sebesar 4%. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin besarnya wilayah perkotaan suatu daerah maka akan menyebabkan semakin turunnya penawaran tenaga kerja untuk memasuki lapangan pekerjaan karena semakin banyaknya persaingan untuk memasuki dunia kerja sehingga tingkat pengangguran akan terus meningkat.

Sementara itu, DIY didominasi oleh wilayah pedesaan sehingga pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran yaitu 400 ribu orang (BPS, 2020). Akan tetapi sektor ini rentan terhadap pengangguran musiman karena pekerja informal hanya bekerja ketika musim tanam / panen (Sholikhah, 2022). Selain itu sektor informal juga rentan terhadap ketimpangan pendapatan karena memungkinkan pendapatan yang berfluktuasi dan sulit dimonitor oleh pihak terkait.

Berdasarkan Tabel 1 koefisien regresi pada perubahan variabel UMR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,193. Karena nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka cukup bukti untuk menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UMR secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, Rohmah & Sastiono (2021) dan Ariesta et al.(2022) yang menemukan bahwa variabel UMR tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dimana sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor informal karena sulitnya mengakses sektor formal dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA. Hal ini menjadikan UMR tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Latar belakang masyarakat Provinsi DIY yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri menjadikan bukti bahwa kebijakan upah minimum regional tidaklah efektif untuk menurunkan angka ketimpangan. Dimana tenaga kerja informal merupakan tenaga kerja lepas dan tidak terikat kontrak sehingga pendapatan yang mereka dapatkan setiap bulannya tidak bergantung dengan adanya besaran upah pokok maupun tunjangan lainnya. Dengan kata lain pekerja di sektor informal hampir tidak memiliki upah atau gaji per bulan dan dapat dikatakan pendapatan mereka berfluktuasi. Berbeda dengan pekerja formal yang dimana mereka menandatangani kontrak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan (RPJMD, 2023). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian ini menggunakan *mixed effect model* yang memungkinkan untuk melihat unit analisis yang lebih kecil pada level selanjutnya yaitu kabupaten/kota di Provinsi DIY. Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Tabel 2 dapat diketahui bahwa efek acak hanya terdapat di intersep/konstanta yang menunjukkan adanya perbedaan indeks Gini untuk setiap kabupaten/kota secara rata – rata pada tahun 2012 hingga 2023, dan tidak terdapat efek acak pada koefisien IPM, TPT dan UMR karena hasil setiap wilayah menunjukkan koefisien yang sama untuk semua wilayah. Atau dengan kata lain model yang tepat digunakan adalah *intercept varying model*.

Tabel 2. Hasil *Mixed Effect Model Varying Intercept* dan *Varying Coefisien*

| Wilayah | Intersep | Koefisien DIPM | Koefisien TPT | Koefisien DUMR |
|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|
| Kulon Progo | 0,2917 | 0,2137 | 0,0177 | $0,18 \times 10^{-8}$ |
| Bantul | 0,3089 | 0,2137 | 0,0177 | $0,18 \times 10^{-8}$ |
| Gunung Kidul | 0,2627 | 0,2137 | 0,0177 | $0,18 \times 10^{-8}$ |
| Sleman | 0,3045 | 0,2137 | 0,0177 | $0,18 \times 10^{-8}$ |
| Kota Yogyakarta | 0,2888 | 0,2137 | 0,0177 | $0,18 \times 10^{-8}$ |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Terdapat faktor eksogen yang mempengaruhi ketimpangan selain IPM, TPT dan UMR yang mempengaruhi perbedaan intersep antar kabupaten/kota. Beberapa kemungkinan faktor eksogen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu letak geografis, potensi pendapatan, kebijakan pemerintah dan kondisi sosial budaya di kabupaten/kota DIY. Pertama, sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY tidak lepas dari karakteristik wilayah dan geografis Provinsi DIY. Sektor ini ditentukan oleh kondisi alam sehingga sektor ini menjadi kunci utama penentu pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024b; 2024c; 2024c; 2024d dan 2024c) terlihat bahwa tiga sektor tersebutlah yang menjadi sektor unggulan di setiap wilayah kabupaten/kota. Dimana Kabupaten Gunung Kidul memiliki nilai gini paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY sebesar 0,26. Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah yang memiliki potensi besar dalam hasil panen pertanian maupun sektor wisata alam terbesar di Provinsi DIY (BPS, 2024a). Sehingga wilayah kabupaten/kota (Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta) perlu mengoptimalkan sektor unggulannya supaya dapat menyerap tenaga kerja dan meratakan pendapatan.

Kedua, faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah alih fungsi lahan dan kebijakan pemerintah. Rasio gini di wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman termasuk kategori cukup tinggi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi DIY diakibatkan adanya pengembangan wilayah yang tidak diikuti kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Dibuktikan dengan adanya peralokasian lahan menjadi pemukiman yang menyebabkan hasil sektor pertanian berkurang sehingga menurunkan hasil pendapatan di sektor pengolahan. Hal tersebut

tentu memunculkan efek negatif bagi beberapa masyarakat yang dimana mata pencahariannya sebagai petani sehingga memunculkan pengangguran baru. Alasan ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul mendapatkan pengaruh perkotaan akibat wilayah tersebut berdekatan dengan Kota Yogyakarta. Sehingga wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul disebut dengan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang menyebabkan adanya perubahan pola ekonomi (Valent *et al.*, 2021). Kebijakan pemerintah yang belum sempurna dan belum siap akan pertumbuhan penduduk sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian penyalahgunaan lahan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai petani. Dalam hal ini perlunya kebijakan yang tepat yang dilakukan pemerintah dan adanya kesadaran taat hukum walaupun sebagai pihak yang berwenang agar proses pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif (Wibisono & Yeni Widowaty, 2023).

Ketiga, sosial budaya masyarakat DIY menerapkan *life style* (gaya hidup) yang *low profile* dan *nerimo* (BPS, 2024a). Hal itu didorong dengan adanya faktor kondisi alam yang tenang dan suasana hidup yang adem ayem sehingga mempengaruhi aktivitas sehari – hari dan pola pikir yang masih sederhana. Sehingga terjadi gap pembangunan manusia di setiap wilayah kabupaten/kota karena faktor pembangunan ekonomi yang masih belum merata dan belum dirasakan oleh semua kalangan. Pembangunan yang masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan pencapaian pembangunan manusia menjadi berbeda. Terbukti bahwa capaian indeks pembangunan manusia tahun 2023 tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 88,61. Sedangkan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo indeks pembangunan manusia tercatat masing – masing sebesar 71,46 dan 75,82. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan wilayah perkotaan (BPS, 2024a). Keadaan geografis, potensi pendapatan, kebijakan pemerintah dan sosial budaya yang dimiliki di setiap wilayah kabupaten/kota DIY menjadikan wilayah Provinsi DIY sebagai daerah yang istimewa dan unik dalam pembangunan ekonominya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperoleh temuan, yaitu terbukti variabel IPM dan TPT berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pada variabel IPM dan TPT akan berpengaruh terhadap kondisi ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel UMR terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan maupun penurunan pada variabel UMR tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut didukung oleh nominal upah minimum regional yang diterima antar kabupaten/kota tidak beda jauh. Dalam penelitian ini terdapat temuan menarik dimana wilayah Kabupaten Gunung Kidul memiliki angka ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah. Namun Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi wilayah yang memiliki angka ketimpangan tinggi dibandingkan rata – rata indeks gini Provinsi DIY.

Saran kebijakan yang dapat diajukan untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY adalah perlunya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih merata dengan pengawasan dinas terkait di setiap wilayah kabupaten/kota. Perlunya peningkatan program pada penyesuaian keterampilan kerja dan kebutuhan kerja. Perlunya upaya peningkatan sektor unggulan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan wilayah kabupaten/kota DIY. Perlunya kebijakan pemerintah atas alih fungsi lahan agar tidak menimbulkan dampak negatif agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan. Perlunya jaring pengaman sosial pada pekerja informal yang rentan terhadap kehilangan pekerjaan. Perlunya penyederhanaan sosial budaya di masyarakat wilayah kabupaten/kota di Provinsi DIY

tanpa mengurangi esensi kebudayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, penelitian lebih lanjut terkait ketimpangan distribusi pendapatan di DIY terutama dengan memasukkan faktor eksogen ke dalam model perlu dilakukan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih detail menjelaskan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afini, N. (2019). Pengaruh PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pemerataan pendapatan di provinsi Jawa Timur. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 172–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.90>
- Ariesta, L. C. O. W., Jamzani Sodik, & Didi Nuryadin. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 737–754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat 2023 daerah istimewa Yogyakarta*.
- Bappeda, D. (2013). *Peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2009 tentang rencana pembangunan angka menengah daerah (Rpjmd) tahun 2009–2013*.
- BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan DIY. *Badan Pusat Statistik*, 36, 1.
- BPS. (2024a). *Analisis indikator makro sosial ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta triwulan IV 2023*. 2.
- BPS. (2024b). *PDRB kabupaten kulon progo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2021-2023*.
- BPS. (2024c). *PDRB kabupaten sleman atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2021-2023*.
- BPS. (2024d). *PDRB kota Yogyakarta atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2021-2023*.
- BPS. (2024e). *PDRB menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2021-2023*.
- BPS. (2024f). *PDRB perkapita menurut kabupaten/kota (ribu rupiah), 2021-2023*.
- Fachruurrozi, M., & Hasmarini, I. (2023). *Economics and Digital Business Review Analisis Determinan Ketimpangan Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021 Pendapatan Daerah*. 4(1), 674–680.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Istikharoh, I., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125.
- Khoiri, A. Z., Pahlawan, E. R., & Samara, F. H. (2022). *Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Pendekatan Data Panel 2016-2020 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Pendekatan Data Panel 2016-2020. January 2023*.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Pratama, M. A. W. (2019). *Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I. Yogyakarta*. 1–17.
- Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah (studi kasus provinsi-provinsi di Jawa). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 235–256. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.15>
- RPJMD, B. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sholikah, N. R. (2022). Pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka serta pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(3), 247–253.
- Sulistyaningrum, B. I., Bhinadi, A., & Astuti, R. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi. *Sinomika Journal*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Todaro, M., & Smith, S. (2015). *Economic Development, 12th Edition* (12th ed.). Erlangga.
- Valent, C. G., Subiyanto, S., & Wahyuddin, Y. (2021). *Analisis pola dan arahan perkembangan permukiman*

di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta (apy)(studi kasus : kabupaten Sleman). April, 78–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2021.30636>

Wibisono, G., & Yeni Widowaty. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>